



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKOTJO, S.E.
Jabatan : KEPALA BADAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

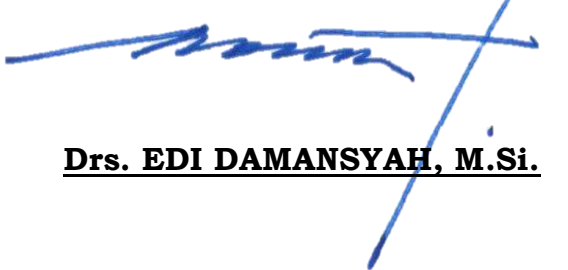
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN



SUKOTJO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197309081993021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	29
		Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	29
2.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100

6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
15.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.82.127.000.013	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.1.249.593.462.584	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.21.647.327.956	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.353.367.790.553	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN



SUKOTJO, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197309081993021001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
Jabatan : Sekretaris.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUKOTJO, S. E.
Jabatan : Kepala Badan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Badan,

SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Sekretaris,

H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

PERJANJIAN KINERJA
Kepala Bagian/ Sekretaris/ Bidang dan Setingkat Esselon III

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	29
		Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	29
2.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persentase	100
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Ketepatan Waktu Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase	100
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persentase	100
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Ketepatan Waktu penyusunan dan Nilai LPPD	Nilai	3,7
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani Manajemen Risiko PD	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persentase	100
15.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	82.127.000.013,00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	1.249.593.462.584,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	21.647.327.956,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.353.367.790.553,00	

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Sekretaris,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SRI WAHYUNINGSIH. S. Sos.
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
Jabatan : Sekretaris,

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Sekretaris,

H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

Pihak Pertama ;
Analis SDM Sub Koord. Sub Bagian
Kepegawaian;

Hj. SRI WAHYUNINGSIH. S. Sos.
NIP. 197504102000122005.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi	Laporan dan Dokumen	9
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	Orang	32

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.000.000,00	APBD
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	70.000.000,00	APBD
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.000.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.000.000,00	APBD
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Sekretaris,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

Pihak Pertama ;
Analisis SDM Sub Koord. Sub Bagian
Kepegawaian,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S. Sos.
NIP. 197504102000122005.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JURIANSYAH, S. E ., M. Si.
Jabatan : Perencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
Jabatan : Sekretaris,

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Sekretaris,

H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

Pihak Pertama ;
Perencana Ahli Muda Sub Koord. Sub
Bagian Penyusunan Program dan
Keuangan ;

JURIANSYAH, S. E ., M. Si.
NIP. 197406012001121008.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	Persentase	100
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4
8.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Dokumen	1
9.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase	100
8.	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	Orang/ Bulan	168
9.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Laporan	10

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	ASN	Pelaksanaan Tugas ASN		
10.	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	550
11.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1
12.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1
13.	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
14.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12
15.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	964.680.000,00	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	450.000.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	61.560.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.780.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	25.560.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.	25.780.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.000.000,00	APBD
8.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah.	50.000.000,00	APBD
9.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	50.000.000,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.556.662.347,00	
10.	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.544.445.813,00	APBD
11.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	275.000.000,00	APBD
12.	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	APBD
13.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000,00	APBD
14.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000,00	APBD

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
15.	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	APBD
16.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	840.505.000,00	APBD
17.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara. 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Sekretaris,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

Pihak Pertama ;
Perencana Ahli Muda Sub. Koord. Sub.Bag.
Peny. Program dan Keuangan,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



JURIANSYAH, S. E., .M. Si.
NIP. 197406012001121008.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADI SUCIPTO. S. Sos., M. Si.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
Jabatan : Sekretaris,

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Sekretaris,

H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bagian
Umum dan Ketatalaksanaan

HADI SUCIPTO. S. Sos., M. Si.
NIP. 197005101996031001.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100
1.	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
3.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
4.	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100
5.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
6.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
7.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100
9.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
10.	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100
11.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
12.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100
13.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1
14.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	23

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
15.	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60
16.	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	265.000.000,00	
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	100.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	50.000.000,00	APBD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	30.000.000,00	APBD
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.	35.000.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.184.580.000,00	
2.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000.000,00	APBD
3.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	APBD
4.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	184.580.000,00	APBD
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.600.000.000,00	APBD
6.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300.000.000,00	APBD
7.	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	400.000.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.205.997.708,00	
8.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.971.077.666,00	APBD
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000.000,00	APBD
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.350.000.000,00	
10.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000,00	APBD

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
11.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	APBD
12.	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	APBD
13.	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.350.000 APBD.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Sekretaris,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



H. AHMAD MARISI, S. T., M. M.
NIP. 197602032001121001.

Pihak Pertama ;
Ka.Sub.Bag. Umum dan Ketatalaksanaan,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



HADI SUCIPTO. S. Sos., M. Si.
NIP. 197005101996031001.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WENDI FRIHINDARWAN. S. E., M. M.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUKOTJO, S. E.
Jabatan : Kepala Badan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Akuntansi,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


WENDI FRIHINDARWAN. SE., MM.
NIP. 197607222003121005.

PERJANJIAN KINERJA
Kepala Bagian/ Sekretaris/ Bidang dan Setingkat Esselon III

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.	Dokumen	29
		2. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Dokumen	29
2.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3.	Terlaksananya Kepatuhan Input e Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	5
5.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
6.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
7.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
8.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
9.	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.496.021.326,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Akuntansi,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


WENDI FRIHINDARWAN, SE., MM.
NIP. 197607222003121005.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFITANTO MALANG YUDO, S. E., M. M.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Belanja.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WENDI FRIHINDARWAN. S. E., M. M.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Akuntansi ;

WENDI FRIHINDARWAN. SE., MM.
NIP. 197607222003121005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Belanja

AFITANTO MALANG YUDO, S. E., M. M.
NIP. 197611152006041013.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	<i>Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	<i>Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi.</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.	600.000.000,00	APBD

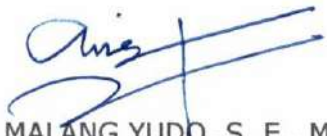
Kutai Kartanegara, 01 Februari 2024.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Akuntansi ;



WENDI FRIHINDARWAN. SE., MM.
NIP. 197607222003121005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Belanja



AFITANTO MALANG YUDO, S. E., M. M.
NIP. 197611152006041013.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE SURYANA. S. H.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Laporan Keuangan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WENDI FRIHINDARWAN. S. E., M. M.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

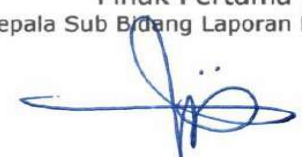
Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Akuntansi ;


WENDI FRIHINDARWAN. SE., MM.
NIP. 197607222003121005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Laporan Keuangan ;


ADE SURYANA. S. H.
NIP. 197402202005021001.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu.	Persentase	100
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	umlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	3
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	4
		Persentase Pejabat Penata-usahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP.	Persentase	100
3.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	232
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi.	Persentase	100
4.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	3
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	2

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	150.000.000,00	APBD
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	210.000.000,00	APBD
3.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	436.021.526,00	APBD

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
	Kabupaten/Kota		
4.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.	900.000.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	199.999.800,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Akuntansi ;

WENDI FRIHINDARWAN. SE., MM.
NIP. 197607222003121005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Laporan Keuangan ;

ADE SURYANA. S. H.
NIP. 197402202005021001.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONI BOWO SATOTO, S. H.
Jabatan : Kepala Bidang Aset.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUKOTJO, S. E.
Jabatan : Kepala Badan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Badan,

SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Aset,

TONI BOWO SATOTO, S. H.
NIP. 197805022009011005.

PERJANJIAN KINERJA
Kepala Bagian/ Sekretaris/ Bidang dan Setingkat Esselon III

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Cakupan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	85
2.	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.	Presentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100
3.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah.	Persentase Pelaksanaan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berada di Pengguna Barang Milik Daerah.	Persen	100
4.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangannya secara Efisiensi, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak Diskriminatif dan Akuntabel.	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Persen	100
5.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
6.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
8.	Terlaksananya Kepatuhan Input e Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
9.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
10.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
11.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
12.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
13.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
14.	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
15.	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
16.	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
17.	Penerapan Core Value ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	21.647.327.956,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Aset,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;



TONI BOWO SATOTO, S. H.
NIP. 197805022009011005.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS ANRIADY, S. E., M. Si.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : TONI BOWO SATOTO, S. H.
Jabatan : Kepala Bidang Aset.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Aset,

TONI BOWO SATOTO, S. H.
NIP. 197805022009011005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Aset,

AGUS ANRIADY, S. E., M. Si.
NIP. 197708282001121003.

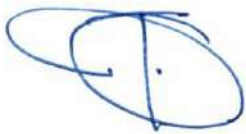
PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang diamankan	Dokumen	1
2.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dinilai	Dokumen	1
3.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dioptimalkan	Dokumen	1

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.500.000.000,00	APBD
2.	Penilaian Barang Milik Daerah	500.000.000,00	APBD
3.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15.147.327.956,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Aset,



TONI BOWO SATOTO, S. H.
NIP. 197805022009011005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset dan Pemindahtanganan



AGUS ANRIADY, S. E., M. Si.
NIP. 197708282001121003.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIMA ADE SURYANATA. S. Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : TONI BOWO SATOTO, S. H.
Jabatan : Kepala Bidang Aset.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Aset,

TONI BOWO SATOTO, S. H.
NIP. 197805022009011005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan
Dokumentasi Aset,

PRIMA ADE SURYANATA. S. Sos.
NIP. 198612262011011001.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persentase	100
1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1
2.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1
4.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1
		2. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan.	Persentase	100
5.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1
6.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Dokumen	1
		3. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persentase	100
7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1
8.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.	Orang	180

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Penyusunan Standar Harga	600.000.000,00	APBD
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	APBD
3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	APBD
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	APBD
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	APBD
6.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000,00	APBD
7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD
8.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
9.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Aset,



TONI BOWO SATOTO, S. H.
NIP. 197805022009011005.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan
Dokumentasi Aset,



PRIMA ADE SURYANATA. S. Sos.
NIP. 198612262011011001.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUKOTJO, S. E.
Jabatan : Kepala Badan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Badan,

SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Perbendaharaan,

SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
NIP. 197012131997032002.

PERJANJIAN KINERJA
Kepala Bagian/ Sekretaris/ Bidang dan Setingkat Esselon III

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.	Dokumen	29
		2. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Dokumen	29
2.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
3.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6.	Penerapan Core Value ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
7.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
8.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
9.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100

No.	KEGIATAN	PERBENDAHARAAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.852.602.455,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Perbendaharaan,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
NIP. 197012131997032002.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIVI NURVADA, S. E., M. Si.
.Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

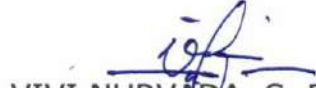
Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Perbendaharaan ;


SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
NIP. 197012131997032002.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Belanja Langsung ;


VIVI NURVADA, S. E., M. Si.
NIP. 197502062005022004.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Transaksi Non Tunai.	Persentase	100
1.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokumen	1
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan.	Persentase	100
2.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	OPD	58

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000,00	APBD
2.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Belanja Langsung ;


SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
NIP. 197012131997032002.


VIVI NURVADA, S. E., M. Si.
NIP. 197502062005022004.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF EKO SUDIBYO. S. Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Perbendaharaan ;


SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
NIP. 197012131997032002.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung ;


ARIF EKO SUDIBYO. S. Sos.
NIP. 198108182001121001.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu.	Persentase	100
1.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.	Dokumen SP2D	Dokumen	10.000
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan	1
3.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan	1

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.	79.545.455,00	APBD
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.	60.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	213.075.000,00	APBD
4.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.946.600,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Perbendaharaan ;


SITI NURWIDIYAWATI, S. E.
NIP. 197012131997032002.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung ;


ARIF EKO SUDIBYO. S. Sos.
NIP. 198108182001121001.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUKOTJO, S. E.
Jabatan : Kepala Badan.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

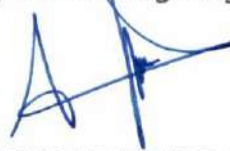
Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Badan,



SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Anggaran,



ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
NIP. 197603082000121002.

PERJANJIAN KINERJA
Kepala Bagian/ Sekretaris/ Bidang dan Setingkat Esselon III

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	3. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.	Dokumen	29
		4. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	29
2.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.950.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


SUKOTJO, S. E.
NIP. 197309081993021001.

Pihak Pertama ;
Kepala Bidang Anggaran,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;


ASPIADY YUSPIHAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
NIP. 197603082000121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AFRIZAL MARDINATA, S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. HUT., CFIA.
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Anggaran ;

ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
NIP. 197603082000121002

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran ;

M. AFRIZAL MARDINATA, S.Sos.
NIP. 19810709 200012 1 003.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Tingkat Perencanaan dan Penganggaran APBD	1. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	Persentase	100
		2. Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.	Persentase	100
		3. Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran.	Persentase	100
		4. Persentase aparatur perencanaan anggaran Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran.	Persentase	100
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD Rancangan perda tentang APBD	Raperd	1
6.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperda	1
7.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1
8.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan.	Dokumen	1
9.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1
10.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1
11.	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	116

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	200.000.000,00	APBD

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	250.000.000,00	APBD
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	250.000.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.400.000.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.400.000.000,00	APBD
7.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	300.000.000,00	APBD
8.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	200.000.000,00	APBD
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.000.000.000,00	APBD
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	250.000.000,00	APBD
11.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Anggaran ;

ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
NIP. 197603082000121002

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran ;

M. AFRIZAL MARDINATA, S.Sos.
NIP. 19810709 200012 1 003.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung Kembar B Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDURRAHIM. S. E.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. HUT., CFIA.
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen, perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 03 Pebruari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Anggaran ;

ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
NIP. 197603082000121002

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran ;

ABDURRAHIM. S. E.
NIP. 197506061994021001.

PERJANJIAN KINERJA
Lurah/ Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ atau setingkat Esselon IV

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Tingkat Kualitas dan Perencanaan dan Penganggaran APBD	Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.	Persentase	100
1.	Merencanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan Kebijakan Terkait Penganggaran.	Dokumen Kebijakan Penganggaran.	Dokumen	1
2.	Merencanakan Pelaksanaan Penataan Administrasi Dokumen Anggaran.	Dokumen Anggaran	Dokumen	1
3.	Merencanakan Pelaksanaan Fasilitas Terhadap Penyusunan Penganggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Dokumen Penganggaran Dana Darurat dan Mendesak serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dokumen	2
4.	Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan SOP urusan Administrasi Anggaran	Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	1
5.	merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Administrasi Anggaran; dan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	1

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2025.

Pihak Kedua ;
Kepala Bidang Anggaran ;



ASPIADY YUSPIAN HANDANI, S. Hut., CfiA.
NIP. 197603082000121002.

Pihak Pertama ;
Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran ;



ABDURRAHIM. S. E.
NIP. 197506061994021001.